

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan generasi Bangsa menjadi manusia yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya yang potensial. Dalam usaha untuk mencapai hal tersebut, maka sangat diperlukanlah suatu usaha kreatif bagi penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi generasi muda untuk dapat menjadi sosok generasi yang dapat membangun bangsa. Pendidikan yang dilaksanakan bukanlah terbatas hanya pendidikan di sekolah, akan tetapi pendidikan luar sekolah yaitu dari masyarakat (Rediasa, 2012 Hlm. 01).

Lebih lanjut, Tirtarahardja (2005 Hlm.129), mengemukakan Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejarahan, yakni pengalaman- pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, dan aspirasi serta harapan masa depan. Melalui pendidikan setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaan yang telah terukir dengan indahnyanya dalam sejarah bangsa tersebut. Serentak dengan itu, melalui pendidikan juga diharapkan dapat ditumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan objektif masa kini, baik tuntutan dari dalam maupun tuntutan karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan. Dan akhirnya, melalui pendidikan akan ditetapkan langkah-langkah yang dipilih masa kini sebagai upaya mewujudkan aspirasi dan harapan di masa depan.

Sebagai seorang pendidik, guru menjadi salah satu aktor penting dalam berkontribusi untuk memajukan pendidikan, pembelajaran yang disampaikan seyogyanya harus tersalurkan dengan baik sehingga siswa dapat menerima pemahaman dengan baik pula. Sebagai seorang guru sejarah, kadang tantangan terbesar adalah menyampaikan peristiwa dan nilai-nilai kesejarahan yang kenyataannya sudah terjadi puluhan dan ratusan tahun silam kepada siswa zaman sekarang.

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan

sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses, pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi (Supriadi, 1998 Hlm. xv).

Keprofesionalan guru sejarah dalam pembelajaran sejarah akan membawa dampak bagi peserta didik. Dampak keprofesionalan pembelajaran sejarah seperti penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Seorang guru sejarah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi sejarah yang harus ditranformasi kepada peserta didik serta penguasaan metodologisnya, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, memiliki pengetahuan yang vital bagi guru dan memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran sejarah (Suroto, 2012:13).

Konsep pendidikan modern telah menegaskan bahwa guru sebagai suatu profesi sebagaimana dirumuskan oleh Moh. Uzer (1992) sebagai berikut (Abdul Majid, 2012 Hlm. 85) :

Guru sebagai profesi, yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dengan syarat-syarat khusus pula; yang mengharuskan untuk menguasai benar seluk-beluk pendidikan dan pengajaran beserta disiplin ilmu terkait lainnya, yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru (Moh. Uzer Usman, 2009 Hlm. 5). Menurut Nasution (1989 Hlm. 1) mengungkapkan bahwa jabatan guru ialah suatu profesi yang hanya dilakukan oleh orang yang mendapat didikan khusus untuk itu, seperti halnya dengan jabatan dokter. Hal senada juga disampaikan oleh Arsyar dan Nurtaian (1991 Hlm. 35) bahwa “guru haruslah seorang yang professional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang tinggi menuntut keahlian, dedikasi, motivasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya”. Mengenai jabatan guru sebagai jabatan professional ditegaskan pula dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2007 Hlm. 20) bahwa:

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

“Pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik pada perguruan tinggi. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, pasal 1 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Guru merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar yaitu menjadikan anak didiknya berhasil dalam bidang akademik maupun non akademik dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat umumnya. Oleh karena itu guru harus memiliki keahlian khusus. Keahlian yang harus dimiliki guru bukan hanya kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk diberikan kepada siswa, guru juga harus mencerminkan keguruannya melalui perilaku dan penampilan sehari-hari baik di sekolah maupun diluarsekolah.

Seorang guru sejarah dalam proses belajar mengajar sejarah tidak hanya menyampaikan materi melalui buku akan tetapi juga materi yang disampaikan menjadi menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apabila seorang guru tidak mampu menyampaikan materi yang diajarkan dengan menyenangkan maka akan timbul kesulitan bagi siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu untuk mempermudah siswa dalam belajar sejarah, siswa harus mampu memahami materi dengan mengenal bukti peninggalan bersejarah yang masih ada sebagai alat bantu dalam belajar sejarah (Prawoto, 2004 Hal. 34)

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, ditetapkan dengan jelas sembilan prinsip profesional (pasal 7 ayat 1), yaitu guru dan dosen : (a) memiliki bakat, minat dan panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas; dan (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; dan (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Selain itu guru dan dosen harus juga: (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru. Khusus bagi guru harus (i) memiliki wadah profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dalam hal ini dosen tidak wajib memiliki wadah profesi, karena akan lebih banyak diatur oleh senat perguruan tinggi masing-masing (Arifin, 2007 Hal. 68).

Dalam upaya pengembangan kompetensi profesionalisme guru, menurut Supriadi (1998), yaitu di antaranya dapat melalui pengoptimalan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk PKG (Pusat Kegiatan Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang memungkinkan para guru berbagai pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Diperlukan suatu wadah yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Organisasi itu dibentuk karena sebagai salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni wadah profesi.

Wadah profesi atau bisa disebut juga sebagai organisasi profesi. Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa konsep umum organisasi adalah entitas sosial yang secara sadar dikordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dengan terus menerus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan umum (Stephen P. Robbins, 1990; Richard L. Draft, 2000). Sementara profesi Secara etimologi berasal dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. Jadi organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.

Bagi guru di Indonesia wadah-wadah tersebut yaitu Persatuan Guru Republik  
Siti Aisyah, 2020  
*EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGENGEMBANGKAN  
PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG*  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI, pertumbuhan organisasi-organisasi profesional di Indonesia berkembang begitu lambat. Sampai pada tahun 1990-an terbentuk beberapa organisasi profesional. Organisasi tertua dipegang oleh PGRI yang berdiri pada tahun 1945 organisasi ini merupakan evolusi dari organisasi persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang didirikan pada tahun 1912, kemudian ada organisasi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1939. Organisasi profesional kependidikan lainnya adalah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) berdiri pada tahun 1953. The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN) berdiri tahun 1953; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) berdiri tahun 1960; Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia (IAIFI) berdiri tahun 1964; Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia (IGBJI) berdiri tahun 1970; Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) sebelumnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) berdiri tahun 1975; Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) berdiri tahun 1987; Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPI) sebelumnya bernama Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (HISPIPSI) berdiri tahun 1989; Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN) berdiri tahun 1992; Persatuan Guru Sejahtera Indonesia (PGSI) berdiri 1993; Ikatan Sarjana Teknologi Pendidikan Indonesia (ISTPI) berdiri tahun 1994; Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) berdiri tahun 1998; dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) sebelumnya bernama Ikatan Sarjana Psikologi (ISPsi) berdiri tahun 1998. (Farisi, 2013 Hal. 39-40).

Perkembangan pesat organisasi kependidikan baru terjadi pada dekade pertama tahun 2000-an, dengan terbentuknya berbagai organisasi profesional “guru” dari berbagai disiplin ilmu pendidikan bahasa Inggris, penulis, ekonomi, matematika, sains, ICT, seni budaya, fisika, pendidikan agama, teknik, sejarah, telematika, madrasah. Pembentukan berbagai organisasi guru ini menjadikan PGRI tidak lagi sebagai organisasi ‘tunggal atau monopolistik’ bagi profesi guru. Setidaknya, hingga akhir tahun 2012 lebih dari 70 organisasi profesional berinisial “guru” yang dibentuk pada tingkat lokal (kabupaten/kota atau provinsi), atau nasional lengkap dengan cabang-cabang organisasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Organisasi-

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

organisasi profesional tersebut secara organisatoris ‘lepas’ dari PGRI seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) beridiri tahun 2009, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) berdiri tahun 2002, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berdiri tahun 2011, dan lain-lain. (Yunis, 2006;Satriwan, 2011; As’ari, 2011).

MGMP sebagai wadah profesi guru yang berbasis mata pelajaran secara profesional, terprogram, dan secara khusus diarahkan untuk mengembangkan standarisasi konsep dan penilain mata pelajaran secaranasional (Saondi, 2010 Hlm. 75).

Tujuan dari berdirinya MGMP seharusnya para guru dapat memanfaatkan dan ikut berpartisipasi dalam wadah tersebut, akan tetapi semua guru belum menyadari hal itu. Adanya sertifikasi guru dan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013, guru dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyasecara efektif. Memanfaatkan wadah profesi guru tersebut guru dapat bertukar pengalaman dan saling berbagi sesama guru sehingga dapat mengembangkan kompetensi guru dan menjadikannya guru profesional. MGMP sebagai wadah dalam pengembangan profesionalisme guru,maka peningkatan MGMP merupakan masalah yang mendesak untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guruinti, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen MGMP. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja MGMP yang berarti. Di beberapa daerah menunjukkan peningkatan MGMP yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Berdasarkan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam mengenai kinerja MGMP. MGMP menjadi sarana yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru, hal ini bisa dilihat daritugas dan fungsi dari adanya wadah MGMP yaitu sebagai tempat guru untuk berdiskusi dan menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat saling tukar pikiran dalam merancang model pemebelajaran danimplementasi Kurikulum secara efektif dan efisisen (Mulyasa, 2008 Hlm. 79)

Peran forum pertemuan guru di MGMP ini sangat strategis karena digunakan  
Siti Aisyah, 2020  
**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN  
PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi guru dan kinerja guru. MGMP yang dilaksanakan dengan lebih terarah dapat dijadikan wahana bagi pengembangan profesionalisme guru yang bermutu, mandiri, dan berkelanjutan (Depdiknas, 2009 Hlm. 2)

Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dikutip dari *Operasional Standar KKG dan MGMP* (2009 Hlm.4) yang disusun oleh dinas Pendidikan bagian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersusunlah beberapa kegiatan MGMP di antaranya :

1. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal mulai dari penyusunan dan pengembangan silabus, penyusunan rencana program pembelajaran (RPP) yang digunakan guru sebagai acuan untuk kegiatan pembelajaran, menyusun bahan ajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit dipahami oleh siswa, pengembangan metode/strategi/pendekatan/media pembelajaran, menentukan sumber belajar, secara bersama-sama menentukan ketuntasan minimal dengan memperhatikan kemampuan siswa di sekolah masing-masing.
2. Dalam kegiatan MGMP diharapkan di antara guru dapat saling berbagi pengalaman /sharing untuk memberikan bantuan dan umpan balik.
3. Guru yang mengikuti MGMP diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inovatif sehingga di dalam kelas tidak terjadi pembelajaran yang monoton.
4. Memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar.
5. Mengubah budaya kerja menjadi lebih kreatif dan inovatif yang berdampak pada terciptanya motivasi tinggi diikuti dengan pengembangan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari meningkatnya hasil belajar siswa dalam rangka mewujudkan pelayanan

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

pendidikan yang berkualitas.

7. Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan di dalam kelas yang selama ini tidak disadari oleh guru dan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga dibutuhkan solusi yang tepat.

Kemudian dikutip dari *Prosedur Operasional Standar* pelaksanaan MGMP dan KKG (2009 Hlm. 9) menyebutkan manfaat MGMP dapat dibagi menjadi lima yaitu :

1. Manfaat bagi siswa. Siswa berpeluang mendapatkan pengajaran yang kreatif, inovatif, aktif, efektif dan menyenangkan.
2. Manfaat bagi guru yang mengikuti program MGMP. Meningkatkan kompetensi guru ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Manfaat bagi sekolah yang tenaga pendidiknyanya mengikuti kegiatan MGMP, sekolah memiliki guru yang profesional sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
4. Manfaat bagi program MGMP itu sendiri, terwujudnya program MGMP sebagai wadah komunikasi, pembinaan dan peningkatan profesi dan karir guru yang terpercaya
5. Manfaat MGMP bagi pemerintah, tersedianya model pembinaan organisasi profesi guru yang profesional untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Begitu pula dengan MGMP Sejarah di Kabupaten Subang mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan profesionalisme Guru sejarah pada SMA se-Kabupaten Subang. Ditambah peranan sejarah lokal di tiap-tiap daerah menambah pentingnya MGMP sebagai tempat diskusi bagi para guru untuk membahas bahan ajar dengan materi sejarah lokal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MGMP Subang cukup memberikan kontribusi lebih bagi kemajuan guru-guru sejarah di Kabupaten Subang dan hal ini merupakan salah satu alasan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih jauh peranan MGMP sebagai wadah para guru-guru khususnya guru sejarah dalam mengembangkan ke profesionalismenya sebagai seorang guru.

Berdasarkan uraian di atas, banyak asumsi yang menyatakan bahwa MGMP mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan standarisasi konsep

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu



dan penilaian mata pelajaran secara nasional, serta dapat dijadikan tempat pengembangan kompetensi guru khususnya kompetensi profesional. Penelitian ini bermaksud melakukan pengamatan terhadap peranan MGMP dalam mengembangkan kompetensi profesional guru sejarah, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

Dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah dalam mengembangkan Profesionalisme Guru Sejarah pada Mata Pelajaran Sejarah di Kabupaten Subang”(Penelitian Survey MGMP Sejarah di Kabupaten Subang)

## **1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “ **Bagaimana Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah dalam mengembangkan Profesionalisme guru Sejarah pada Mata Pelajaran Sejarah di Kabupaten Subang**” Berdasarkan pada fokus permasalahan di atas, maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang?
3. Bagaimana efektifitas MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari efektifitas MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Setelah menguraikan rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan penelitian secara umum yaitu untuk memperoleh gambaran umum mengenai Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah dalam mengembangkan Profesionalisme guru Sejarah pada Mata Pelajaran Sejarah di Kabupaten Subang Adapun tujuan khusus yang ingin

Siti Aisyah, 2020

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran kegiatan yang dilaksanakan MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang
2. Untuk memperoleh gambaran solusi yang ditempuh dalam menghadapi kendala pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang ?
3. Untuk memperoleh hasil dari efektivitas yang dicapai dalam kegiatan yang dilaksanakan MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang ?
4. Untuk memperoleh pengaruh yang signifikan dari efektifitas MGMP sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak terlibat secara langsung dalam pendidikan, adapun manfaatnya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmiah mengenai efektivitas dari MGMP sejarah sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru sejarah, sehingga mampu memberikan gambaran perlunya organisasi profesi seperti MGMP dalam upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi guru sejarah dalam mengembangkan profesionalisme guru dengan ikut aktif dalam organisasi MGMP sejarah. Bagi pihak sekolah khususnya kepala sekolah agar memberikan akses bagi guru-guru anggotanya agar mendukung dalam mengikuti kegiatan MGMP sejarah.

## 1.5 Struktur Organisasi

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan tesis nanti, adalah sebagai berikut :

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang penelitian yang dilakukan serta beberapa fakta lapangan mengenai MGMP sejarah Kabupaten Subang, permasalahan pendidikan secara umum dan peran guru profesional dalam memajukan pendidikan di Indonesia khususnya dalam pendidikan sejarah. Adapun sub-sub bab yang ada di dalamnya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa landasan teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang diambil dari berbagai literatur sebagai Fondasi dalam pelaksanaan penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya yang relevan. Bab II ini berisi tentang konsep efektivitas yang terdiri dari pengertian efektivitas dalam tujuan dari konsep efektivitas. Selanjutnya mengenai konsep guru profesional atau profesionalisme guru yang terdiri dari pengertian profesionalisme guru, tugas dan peranan guru, strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang ideal. Konsep terakhir adalah pengertian dari organisasi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), tujuan MGMP, kegiatan MGMP dan latar belakang berdirinya MGMP.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi pemaparan metode penelitian yang akan digunakan. Pada bab ini dipaparkan mengenai tahapan yang ditempuh penulis ketika melakukan penelitian guna mendapatkan data dan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Secara garis besar, bab Iii ini berisi tentang pendekatan penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, metode penelitian dengan metode survey lokasi penelitian yaitu kantor MGMP sejarah Kabupaten Subang, populasi dan sampel penelitian yaitu anggota

Siti Aisyah, 2020

*EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

MGMP sejarah Kabupaten Subang yang aktif dalam kegiatan serta serangkaian lainnya seperti pengambilan data dan analisis data

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan, serta jawaban dari rumusan masalah, dimulai dari profil MGMP sejarah Kabupaten Subang, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, yang masih berlangsung dan yang akan dilakukan, hasil dari angket atau kuesioner mengenai keefektifitasan kegiatan MGMP dalam mengembangkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Subang.

#### 5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan penelitian berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dalam pendahuluan.